

MEMBUKA RUANG PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN

*Triana Sofiani**

mbaxnana@yahoo.com

08139179469

Abstract: *It is a crucial matter for unchaining female participation scope in development when female themselves are always marginalized not only in the process but also the share of portion in development as well. This will give positive impact in order to amplify the quality of development application, especially which relates to female empowerment and gender. Hence, it may have high replication, not only in the impact of qualified family development but also in heaving female roles while taking decision. The next implication is to be able to encourage national development products in order to be well shared among males and females.*

Kata Kunci: Perempuan, Pembangunan, Ruang dan Partisipasi

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanahkan secara tegas bahwa, setiap warga negara Indonesia - laki-laki dan perempuan - mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama untuk memperoleh kehidupan yang layak. Dalam konteks pembahasan ini bisa diartikan bahwa, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan untuk ikut serta dalam mensukseskan program-program pembangunan dan menikmati pembagian “ kue” pembangunan secara proposional. Namun kenyataannya, posisi dan peran perempuan dalam pembangunan masih termarginalkan. Implikasinya, walaupun dari segi kuantitas jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki, akan tetapi secara kualitas lebih kecil dari laki-laki.

Kondisi tersebut terjadi karena model pembangunan yang dijalankan masih bertumpu pada pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*), sentralistik, cenderung eksploitatif dan menindas perempuan. Perempuan tidak terwakili secara proporsional, sebagai akibat langsung dari model pembangunan dominan yang dipromosikan diseluruh negara-negara miskin berkembang, termasuk Indonesia. Proyek-proyek pembangunan yang diperuntukan bagi perempuan, alih-alih justru menjadikan perempuan semakin termarginalkan. Perempuan hanya sebagai objek, bukan pelaku pembangunan. Padahal partisipasi perempuan dalam pembangunan hanya bisa diwujudkan jika perempuan diposisikan sebagai pelaku atau subjek dalam pembangunan.

Pembangunan seharusnya menjadi alat (*tools*) dan bukannya menjadi tujuan (*ends*) dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar warga negara, laki-laki dan perempuan sehingga kesetaraan antara keduanya bisa terwujud. Pengabaian hak asasi perempuan telah menempatkan perempuan pada posisi yang lemah diantara penduduk miskin yang ada. *Human capital* perempuan yang rendah dalam bidang pendidikan ditambah budaya yang tidak berpihak, bahkan pemahaman tafsir agama yang cenderung *bias* gender,

*Penulis adalah Dosen pada Jurusan Syari'ah STAIN Pekalongan

menjadikan perempuan tersudut dalam posisi yang rentan. Akhirnya, marginalisasi, subordinasi, beban ganda (*double burden*), stereotipe dan kekerasan terhadap perempuan masih menjadi issue strategis dalam pembangunan.

Pemerintah sebenarnya telah mencanangkan strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Akan tetapi, *kran* partisipasi perempuan dalam pembangunan belum dibuka secara maksimal. Hal tersebut terjadi karena, adanya kebijakan ditingkat politik praktis yang berdampak pada pembatasan peran perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, strategi pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah, dalam hal ini PUG sebagai strategi pembangunan nasional, tidak menjadi skala prioritas karena penerapan pengarusutamaan gender bukan merupakan kegiatan yang mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, pengarusutamaan gender sebagai salah satu strategi pembangunan nasional seharusnya dijadikan sebagai bagian integral dari pembangunan yang *sustainable* (Kepmendagri No. 132 tahun 2003).

PEMBAHASAN

A. Pembangunan : Dimana posisi perempuan?

Sulit dipercaya memang jika dikatakan bahwa, ada pembangunan akan tetapi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan masih substansial. Dalam teori "*human capital*" (Barro, 1991: 21) dinyatakan bahwa, ada hubungan erat antara pembangunan manusia, demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, Bhala dengan perspektif lain menyatakan bahwa, ketika demokrasi berjalan dengan baik, pertumbuhan ekonomi akan berjalan dengan cepat dan akan menetes kepada pembangunan manusia. Bhalla dalam teori ini mengimplikasikan "*trickle down efect*" terhadap pembangunan (Bhala 1994 : 3). Berangkat dari asumsi dan teori tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam kehidupan suatu masyarakat yang demokratis antara perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kewajiban sama dan saling mengisi satu dengan yang lainnya , sehingga pertumbuhan ekonomi juga menjadi dinamis. (Tilaar, 1997: 23).

Posisi perempuan dalam pembangunan memang seharusnya ditempatkan sebagai partisipan atau subjek pembangunan bukan sebagai objek sebagaimana yang terjadi selama ini. Realitas menunjukkan bahwa posisi perempuan masih sebagai objek pembangunan, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: *pertama*, masih kuatnya faktor sosial dan budaya patriarki yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang beda; *kedua*, masih banyak perundang-undangan, kebijakan dan program pembangunan yang belum peka gender; *ketiga*, kurang adanya sosialisasi ketentuan hukum yang menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan secara menyeluruh; *keempat*, belum adanya kesadaran gender di kalangan para perencana dan pengambil keputusan; *kelima*, belum lengkapnya data pilah yang memaparkan posisi perempuan dan laki-laki secara jelas dalam bidang pembangunan di semua departemen; *keenam*, belum maksimalnya kesadaran, kemauan dan konsistensi perempuan itu sendiri dan; *ketujuh*, kurangnya pengetahuan perempuan terhadap tujuan dan arah pembangunan, sehingga perempuan kurang respon, masa bodoh atau menolak secara tidak langsung dari program-program pembangunan.

Usaha-usaha pembangunan selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. Kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang sama bagi semua penduduk baik laki-laki maupun perempuan akan menambah pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro, 2000: 43). Oleh karena itu, dengan pembangunan diharapkan bisa mengurangi berbagai permasalahan sebagaimana di atas. Hal tersebut sejalan dengan paradigma pembangunan modern yang menyoroti bahwa pembangunan harus dilihat sebagai suatu proses yang multi dimensional (Kuncoro, 2003:64). Dengan

demikian, diperlukan responsif gender untuk memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat yang ditujukan untuk kesetaraan dan keadilan sehingga keterlibatan (*involved*) antara keduanya menjadi proposional dalam setiap proses pembangunan.

Dalam buku *Engendering Development* yang diterbitkan *World Bank* menyebutkan bahwa, kesetaraan gender merupakan persoalan pokok pembangunan yang akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan dan menjalankan pemerintahan secara efektif. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya memperhatikan masalah yang berkaitan dengan kesetaraan gender dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut: *pertama*, meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan gender. *Kedua*, meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan, dalam meningkatkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks pendekatan yang pernah dipakai untuk meretas masalah terkait dengan posisi perempuan dalam pembangunan, menunjukkan dimana posisi perempuan. Pendekatan- pendekatan tersebut, yaitu: WID (*Women In Development*), WAD (*Women And Development*), dan GAD (*Gender And Development*).

WID (*Women In Development*), adalah suatu program peningkatan peranan perempuan yang menitikberatkan pada upaya mengejar ketertinggalan perempuan. Sehingga, perempuan mendapat kesempatan berpartisipasi yang sama dengan laki-laki dalam pendidikan, pekerjaan dan aspek kehidupan masyarakat yang lainnya. Konsep ini didasarkan pada paradigma modernisasi, yang difokuskan pada inisiatif pengembangan teknologi, dengan maksud meringankan beban kerja perempuan (Yulia Cleves Mosse, 2007: 205). Dari berbagai peninjauan terhadap konsep WID, ternyata paradigma modernisasi yang diusung dari konsep ini, justru semakin memarginalkan kaum perempuan.

WAD (*Women And Development*). Pendekatan ini berasumsi bahwa posisi perempuan akan menjadi lebih baik selama struktur internasional menjadi lebih adil. Konsep ini merupakan koreksi terhadap sistem perekonomian internasional, perubahan struktur internasional, dan pengurangan ketergantungan negara ketiga. Pendekatan ini cenderung kurang mengindahkan sifat penindasan gender khususnya perempuan. Posisi perempuan dilihat sebagai bagian dari struktur internasional dan ketidakadilan kelas, ketimbang sebagai akibat dari ideologi dan struktur patriarkhi. Pendekatan ini cenderung dilakukan dengan menitikberatkan pada kegiatan yang mendatangkan pendapatan perempuan dan kurang mengindahkan tenaga perempuan yang diisumbangkan dalam mempertahankan keluarga dan rumah tangga.

GAD (*Gender And Development*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara melihat perempuan sebagai subyek pembangunan, agen perubahan dengan menitikberatkan pada pola hubungan yang setara perempuan dan laki-laki. Pendekatan ini, lebih bersifat *bottom up*, sehingga pengalaman dan pemahaman yang berasal dari perempuan menjadi *entry point* dari proses pembangunan. Kemitrasejajaran perempuan dan laki-laki dalam wujud persamaan hak, kedudukan, kemampuan, peranan, kesempatan yang sama dalam pembangunan di segala bidang kehidupan menjadi modal utama adanya kesetaraan gender, sehingga baik jenis maupun imbalan kerja akan diberikan kepada laki-laki maupun perempuan secara proposional. Hal ini sejalan dengan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidangnya tanggal 18 Desember 1979 yang telah menyetujui tentang konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

B. Menciptakan Ruang Perempuan dalam Pembangunan: Strategi Menuju Partisipasi

Sejalan dengan uraian tersebut, upaya peningkatan posisi dan peran perempuan di dalam pembangunan menjadi “*mainstream*” dalam berbagai bidang, misalnya tampak dalam kutipan sebagai berikut: “*Develop the fullest potential of girls and women of all ages, ensure their full and equal participation in building a better world for all and enhance their role in the development process*” (Deklarasi Beijing, 1996). Upaya menciptakan ruang bagi perempuan dalam pembangunan dilakukan dengan berbagai strategi atau pendekatan sebagaimana sudah dikemukakan di atas. Pendekatan-pendekatan tersebut, yaitu: WID (*Women In Development*), WAD (*Women And Development*), dan GAD (*Gender And Development*).

Pendekatan yang paling jitu terkait dengan penciptaan ruang bagi perempuan dalam pembangunan adalah pendekatan GAD (*Gender And Development*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara melihat perempuan sebagai subyek pembangunan, agen perubahan dengan menitikberatkan pada pola hubungan yang setara perempuan dan laki-laki. Pendekatan ini, lebih bersifat *bottom up*, sehingga pengalaman dan pemahaman yang berasal dari perempuan menjadi *entry point* dari proses pembangunan. Kemitrasejajaran perempuan dan laki-laki dalam wujud persamaan hak, kedudukan, kemampuan, peranan, kesempatan yang sama dalam pembangunan di segala bidang kehidupan menjadi modal utama adanya kesetaraan gender, sehingga baik jenis maupun imbalan kerja akan diberikan kepada laki-laki maupun perempuan secara proporsional.

Gender sendiri adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat konstruksi sosial dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat (Julia Cleves Mosse, 2002:2). Sedangkan pembangunan Rogers mengartikan bahwa, pembangunan sebagai proses yang terjadi pada level atau tingkatan sistem sosial, dan modernisasi menunjuk pada proses yang terjadi pada level individu (Rogers, 1991: 69). Merujuk pada pendapat tersebut, berikut beberapa masalah gender dalam pembangunan yang diindikasikan melalui 4 indikator makro, antara lain: (a) tingkat pendidikan rata-rata; (b) pendapatan perkapita; (c) Indeks daya beli; dan (d) Indeks Pembangunan Manusia.

Indikator-indikator tersebut untuk keperluan pengukuran peran gender dalam pembangunan partisipatif, dimana masih terjadinya berbagai permasalahan peran, misalnya: adanya dikhotomi peran perempuan dan laki-laki. Perempuan bekerja di sektor domestik dan laki-laki di sektor publik; beban kerja ganda (*double burdens*); tingkat partisipasi dalam pembangunan perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Desentralisasi pembangunan diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan untuk berpartisipasi dalam melakukan pembangunan di tingkat lokal (Rozaki, Abdur et al. 2004); tingkat peluang memperoleh pendidikan dan pelatihan bagi perempuan lebih rendah dibanding laki-laki, sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi terapan yang dimiliki perempuan lebih rendah dari laki-laki.

Melalui kebijakan yang mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan gender sebagaimana yang diusung oleh konsep GAD, maka setiap pelaksanaan program selalu menggunakan indikator-indikator atau pertimbangan-pertimbangan keseimbangan peran dan manfaat bagi laki-laki maupun perempuan, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Oleh karena itu, pembangunan dalam konteks pendekatan ini harus mencakup tiga nilai, yang meliputi: (Kuncoro, 2000; Todaro, 2000: 16 – 18):

1. Ketahanan (*Sustenance*): kemampuan memenuhi kebutuhan pokok (pangan, sandang, papan, kesehatan, dan proteksi) untuk mempertahankan hidup.
2. Harga diri (*Self esteem*): pembangunan haruslah memanusiakan orang. Dalam arti luas pembangunan haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia.
3. *Freedom from servitude*: kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berfikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha dalam rangka berpartisipasi dalam pembangunan.

Lebih lanjut, berdasarkan data dalam laporan UNDP, terdapat korelasi yang positif antara perkembangan pengarusutamaan gender dengan meningkatnya ranking Indeks Pembangunan Manusia.

Dijelaskan bahwa ada tiga elemen penting yang menjadi fokus pengukuran pembangunan manusia, yaitu: (1) Panjang umur (*longevity*). Indikatornya adalah tingkat harapan hidup (*life expectancy*). Hidup yang panjang dinilai berharga, serta sejumlah manfaat tidak langsung lainnya seperti gizi yang memadai, dan kesehatan yang baik adalah berkaitan erat dengan tingkat harapan hidup yang tinggi; (2) Pengetahuan (*knowledge*). Indikatornya tingkat melek huruf (*literacy rate*); dan (3) Standar hidup yang pantas (*decent living standards*). Indikator yang dipakai adalah pendapatan per kapita yang digabung dengan daya beli (*purchasing power*) yang disesuaikan dengan pendapatan perkapita riil dari Pendapatan Bruto Domestik (GDP).

Tanpa bermaksud mengabaikan pemikiran di atas, hal yang penting dan lebih riil untuk dilaksanakan terkait dengan penciptaan ruang bagi perempuan dalam pembangunan sebagai strategi menuju partisipasi perempuan, antara lain bisa dipilah dalam beberapa pembahasan sebagai berikut:

1. Kebijakan Responsif Gender dalam Pembangunan

Kebijakan Pemerintah mengenai penerapan pengarusutamaan gender dalam Pembangunan Nasional merekomendasikan agar dapat mengupayakan peningkatan anggaran pemberdayaan perempuan secara bertahap sampai mencapai jumlah minimum 5 (lima) persen dari total APBN. Misalnya dalam, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009, yang memuat agenda mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, disusun 5 (lima) sasaran pokok dengan prioritas dan arah kebijakan. Adapun sasaran kedua adalah terjaminnya keadilan gender bagi peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan yang tercermin dalam berbagai perundangan, program pembangunan dan kebijakan publik; membaiknya angka GDI (*Gender Related Development Index*) dan angka GEM (*Gender Empowerment Measurement*); dan menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; serta meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak.

Sejalan dengan paradigma otonomi daerah, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Perlaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah bersama DPRD baik pada tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan dapat bersikap proaktif dalam mengambil prakarsa agar kebijakan pembangunan daerah betul-betul mempertimbangkan laki-laki maupun perempuan untuk mendapatkan akses, kontrol, partisipasi serta manfaat dari seluruh investasi pembangunan di masing-masing daerah. Kondisi dinamis dimana laki-laki dan perempuan memiliki keseimbangan peran, hak, tanggung jawab, kesempatan, posisi yang sama dalam keluarga, masyarakat dan pembangunan agar memberikan pengaruh nyata bagi terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Dimana, Visi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan yaitu “Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dan kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hal ini akan berdampak positif guna meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan, terlebih utama yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender. Sehingga diharapkan dapat memiliki replikasi tinggi bukan hanya berdampak pada pembangunan keluarga yang berkualitas, tetapi juga meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Implikasi selanjutnya adalah, agar mampu mendorong produk pembangunan nasional dapat dinikmati secara adil oleh laki-laki dan perempuan, seperti:

- a. Dalam Keluarga
 - saling mendukung dalam penyelesaian tugas domestik
 - mengelola bersama pendapatan keluarga
 - Berpartisipasi dalam peran sosial di masyarakat
 - Berdialog dalam pengambilan keputusan
 - Mempunyai akses yang sama
 - Memperoleh hak masing-masing dan lain-lain

- b. Dalam Masyarakat
 - Tidak lagi menempatkan perempuan pada sektor domestik, sedangkan laki-laki berada disektor publik
 - Pelabelan perempuan adalah kondisi dimana suatu pekerjaan pantas atau tidak dikerjakan perempuan
 - Perempuan tidak hanya ditempatkan pada posisi yang kurang penting
 - Tidak ada lagi marginalisasi adalah keterpinggirkan yang terjadi pada perempuan dalam mengakses sumber pendapatan.
- c. Dalam Kegiatan Pembangunan
 - Perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam perannya di bidang perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan maupun menikmati hasilnya.
 - Perempuan dan laki-laki secara bersama-sama sekaligus menjadi obyek dan subyek pembangunan.
 - Partisipasi perempuan dalam pembangunan adalah berperan–aktifnya mereka dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan memperoleh hasil atau resiko dari keseluruhan tindakan yang berkaitan dengan upaya pembangunan yang dilaksanakan.
 - Dalam Pengelolaan pembangunan, partisipasi perempuan adalah peran serta perempuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi dan pelestarian pembangunan.
 - Partisipasi perempuan dalam pengelolaan pembangunan bisa dinilai rendah atau tinggi, sempit atau luas, dengan melihat seberapa jenis peran yang dilakukan masyarakat dibanding dengan peran orang luar.
 - Tingkat partisipasi perempuan pada program pembangunan yang satu dan yang lain bisa berbeda atau sama.
 - Tingkat partisipasi perempuan pada tahap-tahap pengelolaan pembangunan tidak selalu sama. Bisa terjadi “rendah” tingkat partisipasinya pada tahap peranan, “tinggi” pada tahap pelaksanaan, dan “sedang” pada tahap pengendalian dan evaluasi.

2. Partisipasi perempuan dalam pembangunan

Ukuran partisipasi perempuan dalam pembangunan dapat dilihat dari:

- a. Pelaku/ pelaksana.
Perempuan tidak lagi sebagai obyek tetapi subyek pembangunan. Misalnya perempuan merupakan pelaku/ pelaksana pembangunan.
- b. Pengendali
Perempuan terlibat langsung terhadap pengendalian dari pelaksanaan kegiatan pembangunan
- c. Pengambil keputusan
Dalam proses pembangunan, partisipasi perempuan langsung terlibat dalam pengambilan keputusan suatu kegiatan pembangunan. Misalnya : sebagai ketua pelaksana kegiatan pembangunan.
- d. Penasehat.
Partisipasi perempuan dalam pembangunan tidak hanya terbatas pada pelaku, pengendali dan pengambilan keputusan saja tetapi lebih tinggi lagi sebagai penasehat dalam proses pembangunan.
- e. Penerima manfaat pembangunan
Hasil pembangunan juga harus bisa dinikmati oleh perempuan, hal ini memberi indikasi bahwa pembangunan yang direncanakan sudah mempertimbangkan perempuan sebagai penerima manfaat pembangunan.

3. Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan

Pemberdayaan masyarakat dalam konteks *community development* berarti pertumbuhan kekuasaan dan wewenang bertindak pada masyarakat untuk mengatasi masalah mereka sendiri (Chambers:1995). Dalam hal ini, perencanaan responsive gender sebagai perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya. Wujud penumbuhan kekuasaan dan wewenang tersebut dengan memberi kesempatan bagi masyarakat untuk merencanakan hingga menikmati program pembangunan yang ditentukan oleh mereka sendiri. Dalam realitasnya ketimpangan pola relasi gender antara laki-laki dan perempuan, dipengaruhi oleh kultur dan struktur yang didukung oleh *human capital* perempuan yang rendah. Secara kultural budaya yang ada dan berkembang di masyarakat menunjukkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan secara struktural, berbagai kebijakan dan program serta instrumen pembangunan (peraturan perundang-undangan) belum responsif gender, kurang memperhatikan potensi, peluang, peran dan tanggung jawab perempuan.

Untuk mewujudkan peran perempuan dan laki-laki (mitrasejajar) yang harmonis, maka perempuan harus mengejar berbagai ketinggalan dari laki-laki dengan berbagai langkah yang ditempuh.

a. Peningkatan kemampuan perempuan

Perempuan sebagai warga negara dan sebagai sumber daya insani pembangunan dapat mengembangkan dirinya secara optimal dengan cara menambah pengetahuan dan keterampilan di segala bidang kehidupan. Masalah perempuan dan pendidikan diarahkan antara lain untuk : (1) menghapuskan perbedaan partisipasi perempuan dan laki-laki di dalam pendidikan dari tingkat dasar, menengah dan menengah atas, (2) terwujudnya pencapaian pendidikan dasar bagi anak laki-laki dan perempuan sebelum tahun 2015, (3) rasio melek huruf perempuan dibanding laki-laki usia 15-24 tahun, dan (4) partisipasi dan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif (*Millenium Development Goals*, 2000). Rendahnya tingkat pendidikan perempuan, akan berdampak pada rendahnya tingkat kesehatan. Hal ini bisa dilihat dari masih tingginya angka kematian ibu melahirkan yaitu 425 per 100.000 kelahiran. Rendahnya tingkat pendidikan perempuan ini juga akan berpengaruh pada kemampuan non fisik lainnya.

b. Peningkatan kedudukan perempuan

Perempuan dapat menduduki posisi dalam mengambil keputusan atau sebagai penentu kebijaksanaan dalam pembangunan. Rendahnya partisipasi perempuan dalam memperoleh kesempatan untuk mengisi posisi-posisi tertentu atau sebagai pengambil keputusan dalam pemerintahan dan organisasi-organisasi lainnya. Hal ini dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif masih sangat rendah bila dibandingkan dengan tingkat partisipasi laki-laki pada sejumlah kursi yang tersedia di legislatif. Demikian pula dengan jumlah perempuan yang menduduki jabatan struktural di lingkungan pemerintahan, tergolong masih sangat rendah dibandingkan dengan laki-laki baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Kesemuanya telah menambah masalah bagi perempuan, di satu pihak rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan yang diakibatkan kondisi kodrat maupun masalah sosial budaya yang dimiliki, seperti hukum dan norma-norma lainnya yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dahulu dan masih berlaku sampai sekarang. Artinya, masih banyak terdapat lingkungan yang kurang peduli dan tidak sepenuhnya mendukung potensi perempuan baik dalam masyarakat maupun dalam lingkungan keluarga. Perempuan pada dasarnya merupakan sumber daya penting dalam pembangunan nasional yang sulit terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi keberadaannya.

- c. Peningkatan akses perempuan dalam pembangunan
Data statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada tahun 1990 yang berjumlah 179 juta orang telah mengalami peningkatan menjadi 200 juta orang (2000). Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat hingga menjadi 254 juta orang pada tahun 2020. Dan, dari jumlah penduduk tersebut dilaporkan bahwa lebih dari separuh merupakan perempuan. Data ini menunjukkan bahwa potensi dari sumber daya perempuan bagi pembangunan di Indonesia cukup besar. Peranan dan kesempatan yang diperoleh perempuan agar dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan memperhatikan kodrat serta menghormati harkat dan martabatnya. Untuk itu, perempuan diarahkan dapat memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk mengakses antara lain : (1) meningkatkan kualitas pendidikan, (2) meningkatkan kualitas kesehatan, dan (3) meningkatkan kesadaran hukum. Bagian yang tertinggal dalam masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya dengan mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya, dengan kata lain memberdayakannya (Ginanjar K, 119:141).
- d. Peningkatan kesejahteraan perempuan
Peningkatan kesejahteraan perempuan, khususnya dalam pengertian melindungi peranan kodratnya dan menghormati harkat dan martabatnya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini (Ginanjar Kartasmita, 1996:145). Selain itu, perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan, pengaruh dan daya saing yang tinggi selain memanfaatkan basis sumber daya alam atau modal fisik, di lain pihak berbasis modal maya (*virtual capital*). Modal maya bisa sangat berperan dalam penciptaan kesejahteraan dan daya saingnya. Ada 3 (tiga) jenis modal maya yakni modal intelektual, modal sosial dan kredibilitas (Raka, 2003: 4).
- e. Peningkatan kemandirian perempuan
Agar perempuan memiliki kepribadian, percaya diri, teguh pendirian, tidak menggantungkan diri pada orang lain, mampu menentukan yang terbaik bagi dirinya, keluarga, masyarakat dan bangsanya, berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas keputusannya, serta mengutamakan kebersamaan dan kesetiakawanan. Keberdayaan dalam konteks ini berkaitan erat dengan kondisi fisik dan mental seseorang. Namun selain nilai fisik adapula nilai-nilai intrinsik dalam masyarakat yang juga menjadi sumber keberdayaan, seperti kekeluargaan, kegotongroyongan dan bagi Indonesia kebinekaan (Ginanjar K, 1996:144).
- f. Peningkatan ketahanan mental dan spiritual
Perempuan harus mampu menghadapi perubahan yang terjadi dan menanggulangi dampak kurang baik dari arus globalisasi dengan memperkuat ajaran agama dan nilai luhur budaya bangsa, upaya ini dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat (*capacity building*) Sunartiningsih (2004:53), dengan memanfaatkan modal sosial yang berkembang dalam masyarakat. Modal sosial dimaksud adalah sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*), dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial untuk kepentingan bersama. Pierre Bourdieu (1970) berpendapat bahwa modal sosial mengacu pada keuntungan dan kesempatan yang didapatkan seseorang di dalam masyarakat melalui keanggotaannya dalam entitas sosial tertentu (paguyuban, kelompok arisan, asosiasi tertentu seperti jama'ah pengajian-majelis ta'lim). Modal sosial ini juga melahirkan "kontrak sosial" dan norma yang berlaku bagi seluruh masyarakat (Ahmad, 2001:2).

PENUTUP

Posisi dan peran perempuan dalam pembangunan, dalam realitasnya masih sebagai objek. Hal tersebut dipengaruhi oleh model pembangunan yang dijalankan, masih bertumpu pada pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*), sentralistik, cenderung eksploitatif dan menindas perempuan. *Human capital* perempuan yang rendah dalam bidang pendidikan ditambah pemahaman budaya yang *bias* gender, patriarkhi, juga menjadi sebab perempuan tersudut dalam posisi yang rentan. Dan yang paling ironis, perempuan sendiri tidak pernah merasakan bahwa semua yang terjadi menyudutkan dirinya, dianggap alamiah. Sehingga dalam konteks pembangunan perempuan menjadi kurang respons, masa bodoh atau menolak secara tidak langsung dari program-program pembangunan.

Oleh karena itu, perlu kiranya menciptakan ruang bagi perempuan dalam pembangunan sebagai strategi untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan dan menikmati hasilnya. Upaya yang dilakukan harus didukung oleh *political will* dari pengambil keputusan dalam seluruh bidang pembangunan, sehingga diharapkan kesetaraan dan keadilan gender akan terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhumami, Amich. *Lima Agenda Pembangunan Ginanjar Kartasmita*. (Jakarta: Media Indonesia. 1996).
- BPS. *Proyeksi Penduduk Indonesia Per Kabupaten/ Kota*. (Jakarta: BPS, 2004).
- Eko, Sutoro. *Manifesto Pembaharuan Desa: Persembahan 40 Tahun STPMD "APMD"*, (Yogyakarta: APMD Press, 2005).
- Fakih, Monsour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- Tilaar, HAR. "Pengembangan Sumber Daya Manusia" dalam *Globalisasi: Misi, Visi, dan Program Aksi Pendidikan dan Pelatihan Menuju 2020*. (Jakarta: Gramedia, 2000)
- Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. *Panduan Gender Dalam Perencanaan Partisipatif*. (Jakarta: KMNPP, 2001)
- Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. *Panduan Perencanaan Berperspektif Gender*. (Jakarta: KMNPP, 2002).
- Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. *Buku Panduan Pendidikan Kesadaran Berbangsa*, (Jakarta: KMNPP, 2002).
- Kelompok Kajian Gender dan Pembangunan. *Panduan Penyusunan Rencana Program Pembangunan responsif Gender*, (Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2004).
- Kuncoro, M. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, (Jakarta: Erlangg, 2004).
- Nasution, Zulkarimen. *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004).
- Saragi, Tumpal P. *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa: Alternatif Pemberdayaan Desa*. Cipruy. (Jakarta: tp, 2004).
- Tilaar, HAR. *Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Era Globalisasi: Visi, Misi, dan Program Aksi Pendidikan dan Pelatihan Menuju 2020*. (Jakarta: Gramedia, 1997).
- Todaro, M.P. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, (Jakarta: Erlangga, 2000).
- UNDP. *Human Development Report 2001: Making New Technologies Work for Human Development*. New York & Oxford, . (Oxford : Oxford University Press, 2001).
- Wahyuningsih, Sri. *Modul Sosialisasi, Konsultasi, dan Advokasi UU No. 23 tentang KDRT: Sebagai Strategi Mencegah dan Menghapuskan KDRT*, (Malang: Dian Mutiara Women's Crisis Center Malang, 2004).

